

BLUE ECONOMY: PROYEKSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI YANG ADIL DAN TRANSPARAN DI INDONESIA

Oleh:

MUHAMAD KARIM

**Dosen Universitas Trilogi Jakarta/Peneliti Pusat Kajian Pembangunan
Kelautan dan Peradaban Maritim**

**Disampaikan dalam Diskusi yang diselenggarakan Transparansi
Internasional Indonesia 21 Maret 2023**

PENDAHULUAN

- Fenomena yang menyatakan bahwa ekonomi biru sebagai obat mujarab mengatasi paradoks antara pertumbuhan (*growth*) dan keberlanjutan (*sustainability*) tidak selamanya benar secara praksis.
- Ekonomi biru sejatinya hanyalah instrument baru dalam ekonomi politik dan pembangaunan berhaluan mainstream economy yang digunakan untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan yang awalnya bukan mengarah bukan sumberdaya kelautan.
- Akibatnya, menimbulkan perbedaan dan ragam definisi, pemahaman dan praktiknya secara empiris.
- Paradigma ekonomi biru yang kini diadopsi PPB dalam pertemuan Konperensi RI+ 2012 semenjak diperkenalkan oleh Gunther Pauli.
- Kini ekonomi biru menjadi “hegemonic” dan menjadi agenda lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, ADB dan IMF) serta NGO internasional yang ikut memengaruhi kebijakan dan regulasi kelautan suatu negara.

PENDAHULUAN

- Bahkan Lembaga-Lembaga tersebut menggelontorkan utang berbentuk skema **blue finance (utang biru)** dan **blue bond (surat utang biru)** bagi negara-negara berkembang. Sepanjang 2013-2017, total perkiraan pembiayaan publik bersumber dari **Green Climate Fund (GCF)**, **Global Environmental Facility (GEF)**, dan Bank Dunia buat mendukung konservasi laut dan aksi iklim mengalami lonjakan drastis dari U\$D500 juta menjadi U\$D2 miliar (ROCA 2019). Dix (2021) menyebutnya sebagai “*blue neocolonialism*”.
- Pertanyaannya: apakah ekonomi biru ini untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan atau malah menunpuk utang luar negeri baru dengan cara memanfaatkan sumberdaya kelautan?
- Schutter (2021) menyatakan bahwa ekonomi biru yang difasilitasi konsep ekonomi hijau yang makin memperkuat dan menanamkan hegemoni ideologi kapitalismenya secara global dalam pemanfaatan/ekstraksi sumberdaya kelautan yang digerakkan lembaga keuangan internasional yaitu Bank Dunia, ADB dan IMF.
- Contohnya: Seychelles yang mengadopsi ekonomi biru yang memosisikan laut sebagai **ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi**.

KONSEP EKONOMI BIRU

TANTANGAN EKONOMI BIRU

1. Problem kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di wilayah pesisir
2. Ketidakadilan pembangunan yang mengorbankan masyarakat pesisir khususnya nelayan skala kecil. Kebijakan Penangkapan Terukur dengan sistem kuota (PP No 11/2023) dalam prosesnya tidak melibatkan/mengabaikan masyarakat lokal/adat khususnya nelayan sehingga semua didominasi negara. Contoh: Di Selandia Baru sebagai negara yang dinggap “berhasil” menerapkan sistem kuota (privatisasi perikanan) sebelum menerapkan sistem itu melakukan konsultasi dahulu dengan Suku Maori dan menetapkan kuota kepada mereka.
3. Penerapan ekonomi biru tak menjamin keberlanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya, karena adanya ambigu secara konsepsional dan pemahaman. Contohnya, aktivitas pertambangan di laut dalam (deep sea) dan pulau kecil (*small Island*; Kasus *P. Wawoni dan Sangihe*) serta di wilayah pesisir (pembabatan Mangrove untuk *Shrimp Estate* justru akan menambah deplesi/degradasi ekologi. Faktanya tambak estate yang telah dikembangkan telah menghilangkan jalur hijau (Green Belt).
4. **Potensi konflik**, akibat pertukaran dalam penggunaan wilayah laut yang berbeda. Misalnya: antara pertambangan di pesisir dan perikanan skala kecil.

TANTANGAN EKONOMI BIRU

5. Mempercepat penangkapan ikan secara industrial (padat modal) di berbagai belahan dunia sehingga mempengaruhi mata pencaharian nelayan, pengolah, dan pedagang skala kecil karena menguras sumber daya perikanan lokal, menimbulkan alat tangkap nelayan skala kecil, membahayakan nyawa nelayan, dan membahayakan sistem pasar dan posisi nilai rantai pasok Selain itu, mengganggu organisasi ekonomi dan sosial nelayan lokal, memengaruhi pendapatan, menimbulkan konflik, terjadi pengucilan dan pemutusan hubungan sosial, dan mengorbankan identitas sosial perempuan; Kasus di Ghana (Ayilu et al 2023).

KONSEP EKONOMI BIRU

- Istilah Ekonomi Biru dipopulerkan, Fisikawan sekaligus pembisnis, Gunter Pauli. Ia menerbitkan bukunya tahun 2010 berjudul “***Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs***”.
- **Ekonomi biru** (*Blue Economy*) merupakan model bisnis yang terinspirasi dari alam dengan cara melakukan inovasi untuk memanfaatkan sumberdaya dan produk limbah agar (Pauli 2010):
 1. Menciptakan 100 juta lapangan kerja hingga 2020
 2. Menghasilkan tambahan keuntungan bisnis (*revenue*) dan
 3. Mencapai zero emisi dunia pada tahun 2050.Model bisnisnya melibatkan dan memanfaatkan sistem jaringan bisnis internasional, para investor dan kalangan peneliti (Pauli, 2010).
- Ekonomi biru yang digagas oleh Gunter Pauli diawali dengan berdirinya lembaga ***Blue Economy Institute*** (BEI) dan ***Blue Economy Alliance*** (BEA). Istilah Ekonomi Biru, sesungguhnya merujuk pada **warna lautan, langit biru dan bumi yang dilihat dari luar angkasa**.
- Ide awalnya bersumber dari **100 inovasi teknologi yang terbaik dan ramah terhadap iklim dan lingkungan, serta efisien dalam memanfaatkan sumberdaya yang bernilai kompetitif**.
- Inovasi teknologi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan **sumberdaya air, energi, pembangunan konstruksi dan melaksanakan proses produksi pangan bagi masyarakat**.

KONSEP EKONOMI BIRU

- Menurut **Gunter Pauli** (2010), Ekonomi Biru, melampaui gagasan Ekonomi Hijau (*Green Economy*) karena **sepenuhnya bersifat ramah lingkungan dan bertujuan untuk mentransformasikan sistem ekonomi secara menyeluruh.**
- Tesis ekonomi Biru:
 1. **Melahirkan generasi baru yang melakukan bisnis dengan hanya memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara lokal termasuk kearifan lokal di suatu daerah;**
 2. **Memanfaatkan limbah sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk baru, dan;**
 3. **Menggunakan produk manufaktur yang efisien dan berkelanjutan sehingga tercipta model ekonomi baru.**

Menurut tesis ini, bekerjanya konsep ekonomi biru kelak **menciptakan kesempatan kerja** di masa datang, kian **meluasnya modal sosial**, serta ekonomi dan kehidupan masyarakat **menuju ke arah yang berkelanjutan (*sustainable*).**

Dari konsep Pauli ini sebetulnya **“tidak”** menyebutkan bahwa **Ekonomi Biru “identik”** dengan **Ekonomi Kelautan.**

- Secara teoritis dan kosepsional prinsip dasar ekonomi biru ini memiliki kesamaan konsep dengan mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism*) yang digaungkan dan disepakati dalam Protokol Kyoto.

ASAL USUL EKONOMI WARNA WARNI

- Terminologi ekonomi berlabel warna-warni sudah pernah diulas **Johan Galtung**, pemikir radikal terkemuka dalam bukunya berjudul “*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*”, tahun 1996. Galtung membaginya 6 aliran:
 1. “Warna Biru” merepresentasikan ekonomi kapitalis berintikan pasar dan modal.
 2. Warna Merah melambangkan ekonomi sosialis yang bertumpu pada negara dan kekuasaan.
 3. warna Hijau mewakili ekonomi nega Dunia ketiga yang sedang berkembang, dan bersendikan masyarakat sipil (civil society) dan dialog
 4. Campuran antara biru, merah dan hijau, menghasilkan warna Merah Muda atau Merah Jambu (pink). Aliran Merah Muda merepresentasikan negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara Nordic/Skandinavia
 5. Campuran warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning, merepresentasikan negara-negara Timur Jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapore
 6. Campuran antara Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi paling ideal. Kombinasi ini secara tak langsung mencampur warna Biru dan Merah yang paling banyak dikritik. Dalam kajian perdamaian, berpotensi memicu konflik dan kekerasan

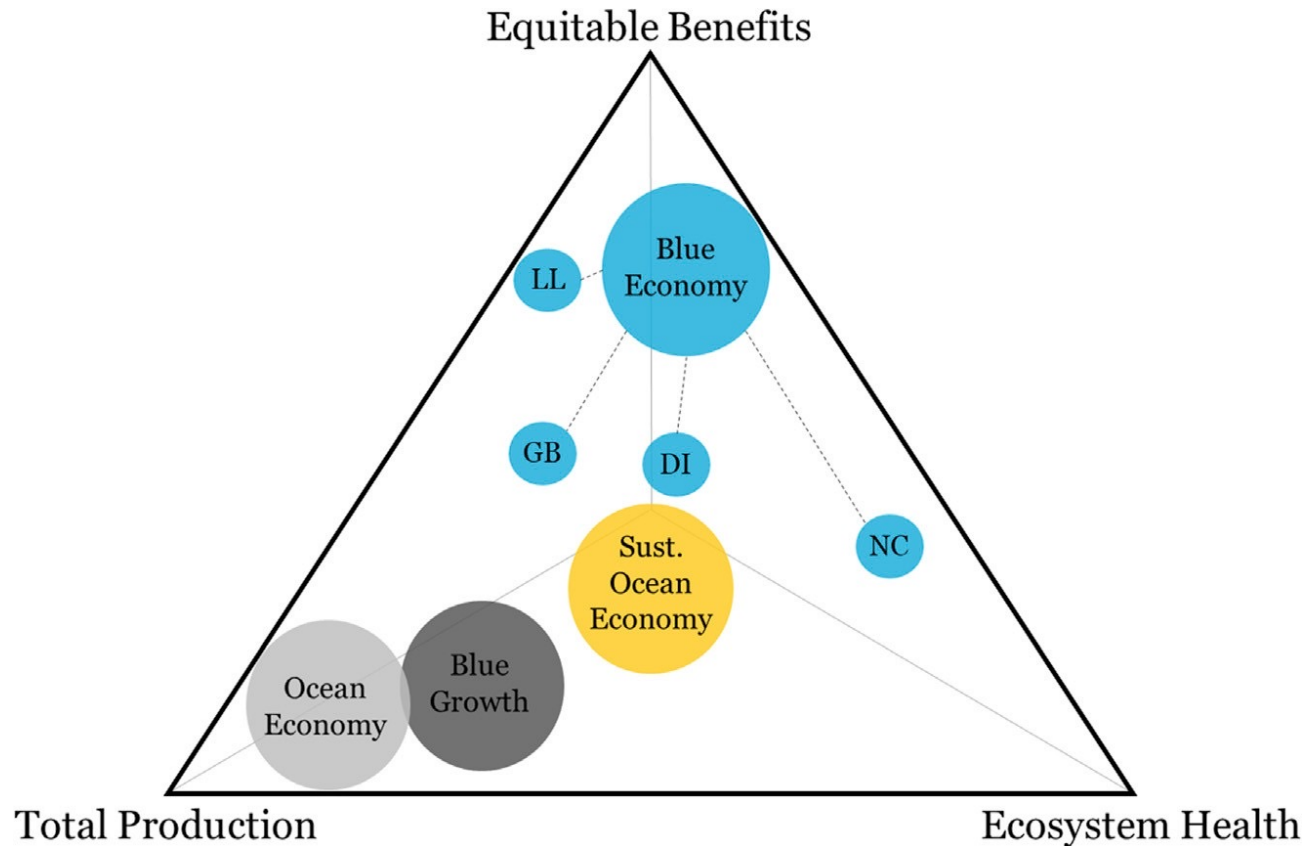
AMBIGU EKONOMI BIRU

- Secara konsepsional maupun praksisnya, perkembangannya ekonomi biru mengalami **ambiguitas dan kontradiksi**. Bahkan ada yang menyamakan ekonomi biru dengan ekonomi kelautan (***ocean economy***).
- Voyer et al (2018) menyatakan bahwa terminology ekonomi biru makin populer dalam tatakelola dan kebijakan kelautan global. Ekonomi biru berupaya dikawinkan dengan konsep pembangunan kelautan berkelanjutan dan perlindungan ekologi, tapi dalam praktinya menimbulkan **kontradiksi sesuai pemahaman negara-negara pengusungnya**.
- Kalangan pengkritik **pertumbuhan biru (*blue growth*)** sebagai target capaian ekonomi biru menyebutnya sebagai bentuk “***perampasan biru***” (***blue grabbing***) (Benjaminsen & Bryceson 2012; Bennet et al. 2015; Hajimichael 2018).
- Faktanya, “**pertumbuhan biru**” dianggap sebagai kelanjutan dari model “**efisiensi kapitalis neoliberal**” yang *mencekik keberlanjutan dan berkembangnya perikanan skala kecil yang berdampak buruk bagi ketahanan nelayan artisanal di seluruh dunia*. Eranya dikenal sebagai “**capitalocene**”.
- Moore (2016), menyatakan bahwa **capitalocene** merupakan proses akumulasi modal secara terus-menerus dengan cara mengorbankan alam dan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan kelompok lebih rentan serta memicu ancaman keberlanjutan sosial (Lihat Koning 2002)

AMBIGU EKONOMI BIRU

- Timbulnya perdebatan/dialektika soal ekonomi biru sehingga menjelma **paling populer di seluruh dunia karena nyaris semua negara mengadopsinya**. Bahkan diusung di forum-forum bergengsi dunia seperti KTT G-20 dan KTT Perubahan Iklim.
- Masalahnya: dalam tatakelola kelautan dan pesisir, serta ranah penelitian dan pengembangannya (penggunaan dalam sektor kelautan) mengalami **ambiguitas** akibat penggunaan istilah yang **membingungkan/kontradiktif dan tumpang tindih**. Terutama, terkait disain dan cakupan pembangunan kelautan, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya secara tradisional.
- Dampaknya: timbul perbedaan penafsiran pemangku kepentingan terkait fokus ekonomi biru khususnya menyangkut **mata pencaharian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut dan modal alamiah** (Cisneros-Montemayor, et al 2022).
- Timbulnya kontradiktif dalam penggunaan istilah ekonomi biru diuraikan Cisneros-Montemayor, et al (2022) (Lihat Gambar) Gambar berikut menampilkan konsep kerangka kerja pembangunan kelautan yaitu: mekanisme “**share**” pemanfaatan sumberdaya yang adil bagi komunitas pesisir, keberadaan populasi rentan (nelayan skala kecil), total produksi sumberdaya kelautan (pendapatan), hingga kesehatan ekosistem laut yang terkait keberlanjutan hidup spesies, fungsi ekologis, dan kualitas air

AMBIGU EKONOMI BIRU



Gambar 1. **Peta Konseptual Pendekatan "Ekonomi Biru" Dikaitkan dengan Ekonomi Kelautan, Pertumbuhan Biru, dan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan.** Pementaannya mencakup identifikasi narasi Ekonomi Biru yang dipergunakan organisasi antar pemerintah, non-pemerintah, dan bisnis kaitanya dengan mata pencaharian (LL), bisnis yang baik (GB), penggerak inovasi (DI), dan modal alamiah (NC) (Cisneros-Montemayor, et al , 2022)

AMBIGU EKONOMI BIRU

Cisneros-Montemayor, et al 2022), menjelaskan tiga istilah dalam gambar di atas secara komprehensif supaya tidak bercampur aduk dan tumpang tindih dengan “ekonomi biru”:

1. **Ekonomi kelautan** (*ocean economy*), lebih menitikberatkan pada **penilaian manfaat seluruh aktivitas ekonomi kelautan secara komersial**. Di dalamnya, sektor terbarukan (*renewables*) yaitu perikanan dan pariwisata bahari. Sementara, sektor tidak terbarukan (*non renewables*), yakni eksplorasi minyak lepas pantai dan pertambangan dasar laut dalam (*deep sea*). Cakupannya ditambahkan dengan sektor non-sumberdaya (*non-resource sectors*) yakni pelayaran dan perdagangan maritim serta teknologi dan pembangunan di wilayah pesisir yang terkait kelautan yang cakupannya mencapai pesisir garis pantai (*marine coastlines*).
2. **Pertumbuhan biru** (*blue growth*). Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelautan. Supaya mewujudkan orientasi dan pencapaian tujuannya membutuhkan pedoman yang menjamin keberlanjutan ekologi terutama bagi aktivitas **pertambangan minyak dan gas lepas pantai**. Atau, jenis aktivitas ekonomi kelautan lainnya yang berpotensi menghasilkan keuntungan finansial besar misalnya bioprospeksi, dan energi terbarukan dari lautan semisal energi angin dan ocean thermal energy. Pertumbuhan biru juga bertujuan menyediakan lapangan kerja baru di wilayah pesisir dan daerah-daerah tertinggal yang berbasis kelautan.
3. **Ekonomi kelautan berkelanjutan** (*sustainable ocean economy*). Bermakna implisit yang lebih jauh ketimbang pertumbuhan biru. Secara eksplisit, ekonomi kelautan berkelanjutan bertujuan menjaga kesehatan ekosistem laut. Sebagai konsep modal alamiah merupakan aktivitas **konservasi** untuk memulihkan fungsi ekosistem laut yang dipahami sebagai **aset modal yang berkontribusi terhadap jasa ekosistem pasar maupun non-pasar bagi kepentingan umat manusia**. Dari pemahaman jasa ekosistem kelautan, konsep ekonomi kelautan berkelanjutan mengakui dan menginternalisasikan ragam perspektif termasuk pengakuan eksistensi **masyarakat adat dan komunitas terpinggirkan dalam tatakelola dan kebijakan pembangunan kelautan**.

Narasi Ekonomi Biru Terpilih dalam Dokumen Kebijakan (Ayilu et al, 2022)

No	Organisasi	Definisi	Area Fokus	Implikasi Bagi Perikanan Skala Kecil
1	UNCTAD (2014)	Bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan	Pembangunan berkelanjutan dan inklusif, kapasitas teknologi, inovasi, serta kebijakan dan regulasi	Fokusnya: subsidi perdagangan dan ketentuan dalam aturan perdagangan yang melampaui keberadaan perikanan skala kecil. Meskipun dalam definisinya mengandung ketentuan tentang komponen sosial
2.	OECD (2016)	Jumlah aktivitas ekonomi kelautan yang berbasis industri bersama dengan aset, barang dan jasa yang disediakan ekosistem lautan.	Perkapalan, industri perikanan dan akuakultur, aktivitas pelabuhan dan pembuatan kapal, minyak dan gas lepas pantai dan laut dalam, energi angin lepas pantai, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari dan pesisir, manufaktur dan konstruksi kelautan, keselamatan dan pengawasan maritim	• Aktivitas ekonomi diprioritaskan melebihi nilai-nilai sosial dan budaya • Pendekatan kawasan perlindungan laut dan perencanaan laut secara spasial (MSP) yang dapat merusak perikanan skala kecil
3.	Eropa Komisi (2020)	Strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor kelautan dan maritim secara keseluruhan.	Budidaya, pariwisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi laut, penambangan dasar laut	• Perikanan dan perikanan skala kecil diabaikan sebagai sektor pertumbuhan • Memberikan peningkatan minat pada akuakultur dan budidaya laut
4.	FAO (2018)	Bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial sembari meminimalkan degradasi lingkungan di seluruh sektor perikanan dan akuakultur	Pengelolaan perikanan dan akuakultur, rantai nilai berkelanjutan - pasar dan produk, akses perdagangan, ketahanan pangan dan nutrisi, pekerjaan dan mata pencaharian yang layak, dan ketahanan masyarakat	• Pendekatan pro-miskin mendukung lebih banyak visibilitas perikanan skala kecil • Penekanan pada negara berkembang memungkinkan perluasan perikanan skala kecil

Narasi Ekonomi Biru Terpilih dalam Dokumen Kebijakan (Ayilu et al, 2022)

No	Organisasi	Definisi	Area Fokus	Implikasi Bagi Perikanan Skala Kecil
5.	Bank Dunia (2020)	Penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, dan ekosistem laut yang sehat	Akuakultur, energi terbarukan, transportasi laut, pariwisata, pengelolaan limbah, perubahan iklim	Dana PRO-BLUE yang berbasis pasar dan menekankan nilai ekonomi sehingga berpotensi mengabaikan kontribusi perikanan skala kecil
6.	(PEMSEA, 2012)	Serangkaian aktivitas komersial, produk, layanan, dan investasi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial yang bergantung dan berdampak terhadap sumber daya pesisir dan laut	Perikanan & budidaya, pelabuhan, pelayaran dan transportasi laut, pariwisata, resor dan pengembangan pesisir, minyak & gas, manufaktur pesisir, penambangan dasar laut, energi terbarukan, bioteknologi kelautan, teknologi kelautan & jasa lingkungan	Untuk dekade selanjutnya, terfokus pada kegiatan komersial, jasa dan investasi yang mengabaikan nilai perikanan skala kecil
7.	PIDF (2017)	Kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan	Perikanan kelautan, wisata bahari dan pesisir, perikanan pesisir dan mata pencaharian masyarakat, energi terbarukan dari lautan, pertambangan laut dalam, karbon biru dan penghijauan	Perikanan lepas pantai lebih menonjol ketimbang perikanan perikanan skala kecil pesisir yang berkontribusi besar di kawasan pasifik
8.	AU-IBAR (2019)	Batasan baru ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan di Afrika yang berkontribusi signifikan terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi Afrika	Pelayaran dan pelabuhan, perikanan dan budidaya, energi, sumber daya mineral, minyak dan gas, dan industri inovatif, pariwisata pesisir dan laut, karbon biru & jasa resiliensi dan ekosistem lainnya	Perikanan skala kecil merupakan sektor tradisional di Afrika. Oleh Karena itu diperlukan penekanan baru tentang ekonomi biru di Afrika yang mendefinisikan perikanan skala kecil secara jelas.

Narasi Ekonomi Biru Terpilih dalam Dokumen Kebijakan

Dari Tabel di atas:

- 1) Penafsiran ekonomi biru memberikan implikasi yang berbeda dan ambigu pada tataran praksis.
- 2) Implikasi yang paling menonjol adalah area/lingkup yang digarap setiap organisasi global maupun regional berdampak negatif bagi nelayan skala kecil
- 3) Ekonomi biru sejatinya adalah agenda lembaga-lembaga internasional maupun regional yang mempengaruhi kebijakan kelautan global yang memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda. meskipun praktiknya menggunakan paradigma yang sama yaitu mengusung **paradigma ekonomi biru**.

Definisi Ekonomi Biru (*Blue Economy*), Pertumbuhan Biru (*Blue Growth*), Ekonomi Marine/Kelautan (*Marine Economy*) dan Ekonomi Kelautan (*Ocean Economy*)

Konsep	Pengarang	Definisi dan Konsep Terkait
Ekonomi Biru (<i>Blue Economy</i>)	Pauli (2010)	Model bisnis yang terinspirasi dari alam dengan cara melakukan inovasi dalam memanfaatkan sumberdaya dan produk limbah untuk (i) Menciptakan 100 juta hingga lapangan kerja hingga 2020; (ii) Menghasilkan tambahan keuntungan bisnis (revenue) dan (iii) mencapai zero emisi dunia pada tahun 2050.
	Bank Dunia (2013)	Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta menjaga kesehatan ekosistem laut
	Costa et al (2019)	Suatu konsep yang memikirkan ulang proses industrialisasi dan mencari solusi kelayakan secara biologis dalam mengurangi kontaminasi
	Phelan et al. [2020]	Menghasilkan kekayaan dari aktivitas kelautan sembari melindungi dan mendukung keberadaan ekosistem laut
	Graziano et al. [2019]	Adanya minat para pihak di seluruh dunia untuk mengembangkan aktivitas berbasisan perairan.
	Schutter & Hicks [2019]	Berupaya membatasi hilangnya keanekaragaman hayati sambil menstimulan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan dan ekonomi
	Kathijotes [2013]	Menjadi arus utama pembangunan nasional yang mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi yang berbasisan pembangunan daratan dan lautan secara berkelanjutan
	Kaczynski [2011]	Mengacu pembangunan kelautan berkelanjutan yang bersifat komersial
	Hoegh-Guldberg et al. [2015]; Patil et al [2016]; UNECA [2016]	Ekonomi biru muncul dalam berbagai forum dalam dua dekade terakhir khususnya dalam kebijakan dan praktek dalam pembangunan lingkungan

Definisi Ekonomi Biru (*Blue Economy*), Pertumbuhan Biru (*Blue Growth*), Ekonomi Marine/Kelautan (*Marine Economy*) dan Ekonomi Kelautan (*Ocean Economy*)

Konsep	Pengarang	Definisi dan Konsep Terkait
Pertumbuhan Biru (Blue Growth)	Caswell et al. [2020]	Lahir dari kebijakan kelautan nasional maupun internasional yang bertujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi kelautan sekaligus mengelola sistem sosio-ekologi kelautan secara holistik
	Dalton et al. [2019]	Menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan di sektor kelautan, sedangkan keragaman dalam pemanfaatan ruang (space) menciptakan penggunaan efisiensi permukaan laut yang tersedia melalui kombinasi berbagai kegiatan industrialisasi
	Boonstra et al. [2018]	Sesuatu yang relatif baru yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi berbasis “eksploitasi” sumberdaya kelautan sambil mencegah degradasi, pemanfaatan berlebihan dan pencemaran
	Burgess et al. [2018]	Istilah baru yang merujuk pada manajemen yang bersifat holistik dalam sistem sosial-ekologi kelautan yang dinamis dan kompleks yang mencakup semua jenis industri dan wilayah/kawasan

Definisi Ekonomi Biru (*Blue Economy*), Pertumbuhan Biru (*Blue Growth*), Ekonomi Marine/Kelautan (*Marine Economy*) dan Ekonomi Kelautan (*Ocean Economy*)

Konsep	Pengarang	Definisi dan Konsep Terkait
Ekonomi Kelautan (<i>Marine Economy</i>)	Qi dan Xiao [2019]	Merupakan sistem yang dinamis dan kompleks mencakup semua jenis industri dan wilayah/kawasan
	Wenwen et al. [2016]	Merupakan model ekonomi baru yang menekankan konsep baru dalam pembangunan, mekanisme operasional dan model manajemen baru
	Caban et al. [2017]	Menyingkap bahaya lingkungan akibat operasionalisasinya. Risikonya menghasilkan tindakan yang disengaja dan bersifat insidental (hidrometeorologi, kondisi mekanis, dll.)
	Bentlage et al. [2014]	Sistem inovasi heterogen yang relevan terhadap pengembangan wilayah Eropa secara spasial dan fungsional
	Spamer [2015]	Secara simultan mendorong inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, memperkuat ekosistem maritim, transparansi dalam tata kelola, serta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Ekonomi Kelautan (<i>Ocean Economy</i>)	UNCTAD [2014]	Merupakan bagian dan pelengkap dari pengembangan paradigma pembangunan yang menekankan ekonomi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif
	Potgieter [2018]	Sebagai faktor penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi global yang menawarkan keunggulan peluang, tantangan, maupun risiko tersendiri
	Colgan [2013]	Ekonomi kelautan mencakup industri konstruksi kelautan, sumberdaya (resources), perkapalan, dan turisme serta industri rekreasi yang berkembang di wilayah atau danau yang besar

Sumber: Martínez-Vázquez et al (2021) dan Pauli (2010)

Definisi Ekonomi Biru (Blue Economy), Pertumbuhan Biru (Blue Growth), Ekonomi Marine/Kelautan (Marine Economy) dan Ekonomi Kelautan (Ocean Economy)

- Definisi Ekonomi Biru berkembang dan organisasi internasional makin mempertimbangkan pentingnya **“keadilan sosial”** dan **eksistensi perikanan skala kecil** dalam memformulasikan kebijakan. Namun, implementasinya terlalu terfokus pada pemahaman konvensional tentang **“ekonomi biru”** dan **“pertumbuhan biru” yang melahirkan kesenjangan** (Das 2023).
- Hasil riset (Das 2023) menunjukkan bahwa publikasi soal ekonomi biru, pertumbuhan biru dan perikanan skala kecil semakin meningkat yang menitikberatkan pada **perluasan sektor, timbulnya konflik, perampasan laut dan bentuk investasi di wilayah pesisir**. Makanya, dalam investasi di wilayah pesisir mesti mempertimbangkan **perikanan skala kecil, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan**.
- Ekonomi Biru memiliki ambiguitas dan fleksibilitas dalam penerapannya serta diadopsi berbagai aktor, hingga tidak selalu kompatibel dalam setiap kasus.
- Tujuan agenda **ekonomi biru dan pertumbuhan biru “tidak bisa”** dicapai bersamaan (Caswell et al., 2020). Untuk mencapainya mesti dinilai dari **pengalaman yang penuh tekanan, situasi masa lalu dan dewasa ini, serta faktor yang mengontrol sistem sosial-ekologis, maupun trade-off-nya** (Caswell et al., 2020).
- Makanya riset Das (2023) merekomendasikan kajian kritis kebijakan ekonomi biru yang bertujuan menyempurnakan strategi, implementasi dan pemahaman kompleksitasnya, terutama terkait **ketidakadilan bagi perikanan skala kecil, pola distribusi yang tidak adil serta potensi konfliknya**.

EKONOMI BIRU SEBAGAI SALAH SATU GERAKAN PEMIKIRAN ALTERNATIF

Secara global terbagi 2 kelompok aliran besar:

1. **Pendukung mazhab pertumbuhan ekonomi dengan memberi atribut “hijau” (green) maupun “biru” (blue).** Yang diusung:
 - Green Economy (UNEP, OECD),
 - Europe 2020 (Europe Commission),
 - Study Commission on Growth (17 Anggota Parlemen Jerman),
 - ***The Blue Economy (Gunter Pauli)***,
 - Cradle to Cradle (Michael Braungart), dan
 - Factor X (Friedrich Schmidt-Bleek dan Ernst Ulrich von Weizsacker)
2. **Mengoreksi dan menolak mazhab aliran pertumbuhan ekonomi.** Terbagi dua varian:
 1. **Menyoal/menggugat pertumbuhan ekonomi dengan mengusung:**
 - Steady State Economy (Herman E Daly),
 - Degrowth (aktivis gerakan masyarakat sipil);
 - Post Growth Society (Tim Jackson, Nico Paech, dan Peter Victor);
 2. **Menekankan kesejahteraan manusia tanpa pertumbuhan dengan mengusung:**
 - Buen Vivier, berkembang di Bolivia dan Ekuador (Alberro Costa dan Eduardo Gydunas),
 - Common Welfare Economy (Christian Felber dan 500 perusahaan);
 - The Solidarity Economy (melibatkan beragam aktor pengembangnya), dan
 - The Transition Movement (Rob-Hopkins, Naresh Giangrande, dan Louise Rooney).

(Sumber: Series Zukunftsdoers, 2012).

Temuan Kunci Analisis Konseptual Ekonomi Biru

	Laut sebagai Modal Alamiah	Laut sebagai Modal Mata Pencarian	Laut sebagai ladang Bisnis yang Bagus	Laut sebagai Penggerak Inovasi
Utama	Tujuan Kemajuan teknologi atau teknis	Perlindungan ekosistem dan/restorasi	Pengentasan kemiskinan dan keamanan pangan	Pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja
Aktor	Lembaga konservasi/LSM	Badan pembangunan, SIDS, Nelayan skala kecil	Industri, ekonomi global yang lebih besar (UE, OECD, Cina dll)	Lembaga-lembaga akademik, industri dan pemerintah
Sektor	Industri padat karbon (misalnya minyak dan gas) dan terkecuali penambangan laut dalam. Terfokus pada manfaat ekonomi dari konservasi, misalnya ekowisata dan Daerah Perlindungan Laut, pembayaran atau jasa ekosistem, karbon biru, dll.	Fokus:utamanya: perikanan skala kecil/ekowisata dengan aspirasi untuk diversifikasi, khususnya budidaya perikanan. Pendekatan kehati-hatian bagi aktivitas penambangan laut dalam.	Termasuk semua sektor tapi fokus utamanya adalah sektor-sektor dan perusahaan multinasional yang besar, yakni perkapalan, minyak dan gas, serta energi terbarukan.	Semua sektor, tapi yang utama adalah industri yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, bioteknologi, dan pertambangan laut dalam.
Skala	Semua skala (termasuk skala ekosistem)	Skala kecil, berbasis lokal	Global/regional dan nasional	Sub-nasional, kabupaten/kota atau provinsi
Alat (Tools)	Daerah perlindungan Laut (Marine Protected Areas/MPAs), Manajemen berbasis ekosistem, penataan ruang laut (Marine Spatial Planning/MSP), valuasi jasa ekosistem	Perikanan yang dikelola masyarakat/ Daerah Perlindungan Laut, MSP, Manajemen berbasis ekosistem dan valuasi jasa ekosistem	MSP, studi valuasi ekonomi, menargetkan investasi dan strategi pertumbuhan	Pusat inovasi/lembaga penelitian, 'tantangan' inovasi atau kompetisi, strategi investasi/pembiayaan

Sumber: Voyer et al (2018)

Temuan Kunci Analisis Konseptual Ekonomi Biru

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsepsional **ekonomi biru** berorientasi kepada **akumulasi kapital yang memanfaatkan ruang laut dan sumberdanya**. Akibatnya, konsep ekonomi melahirkan dua area yaitu “**konsensus dan konflik**”.

- **Area konsensus** mencerminkan tren yang berkembang ke arah komodifikasi dan penilaian alam, dan adanya pembatasan spasial di lautan serta meningkatnya sekuritisasi lautan dunia.
- **Area konflik** timbul karena terjadinya perbedaan pandangan terhadap legitimasi sektor-sektor dalam komponen ekonomi biru utamanya: industri padat karbon (minyak dan gas), dan pertambangan laut dalam (*deep sea mining*) (Voyer 2018)

TANTANGAN EKONOMI BIRU

KRITIK EKONOMI BIRU

- Brent et al (2020) yang menyatakan bahwa esensi ekonomi biru mengandung makna tiga “**fiksasi' biru**” (**blue fixed**) dengan dalih untuk menyelesaikan krisis kapitalisme dunia (Harvey, 2001) yaitu:
 - 1) fiksasi konservasi' (*conservation fix*)
 - 2) fiksasi protein (*protein fix*)
 - 3) fiksasi energi dan ekstraktif (*energy and extractive fix*).Dari ketiga fiksasi biru tersebut, kritik tajamnya adalah narasi ekonomi biru berpotensi mengancam **perikanan skala kecil**. Secara khusus, Brent et al., (2020) menyoroti bahwa “**fiksasi protein**” akan lebih memosisikan kepentingan perikanan skala besar (industrial) sebagai yang terbaik (well-positioned), sementara perikanan skala kecil akan mengalami penindasan (***squeeze small-scale capture fishing out***).
- Ekonomi biru secara spesifik juga melahirkan terminologi **pangan biru (*blue food*)**. Farmery et al (2021) juga memberikan kritik tajam terhadap terminologi pangan biru (*blue food*) sebagai narasi yang dibangun dalam konteks memproduksi dan mengonsumsi pangan dari sumberdaya dan biodiversitas kelautan. Problemnya, **rantai nilai sistem distribusi dan kemampuan konsumen mengakses dan membeli pangan relative kurang terwakili dalam agenda ekonomi biru**. Farmery et al (2021) menyebutnya sebagai “**blind spots**” dalam visi ekonomi biru yaitu: mereduksi kontribusi pangan kelautan menghadapi **ancaman kelaparan dan kekurangan gizi**.

KRITIK EKONOMI BIRU

- Riset Said dan MacMillan (2019) menemukan bahwa secara teoretis dan empiris janji **pertumbuhan ekonomi berkelanjutan** dari konvergensi kebijakan konservasi internasional melalui **paradigma pertumbuhan biru** mengalami “**kegagalan**” dan menciptakan **ketidakadilan serta kesenjangan sosial – ekonomi** diantara komunitas nelayan lokal disertai **gangguan sistem sosial-ekologi perikanan**. Kasus semacam, dialami nelayan Malta yang awalnya memuji dan mendewakan kebijakan neoliberal melalui strategi **pertumbuhan biru**. Tetapi dalam praksisnya malah mencekik dan meminggirkan komunitas nelayan skala kecil. Karena kebijakan ekonomi biru di Malta lebih memprioritaskan korporasi besar dalam aktivitas perikanan tangkap dan mengabaikan perikanan tangkap skala kecil.

KRITIK EKONOMI BIRU

Ertör (2021) menyebutkan tiga dimensi ketidakadilan akibat praktek **ekonomi biru** yaitu:

1. Dimensi “**material dan biofisik**” yang disebabkan 4 faktor yaitu: (i) praktik penangkapan ikan oleh industri komersial, (ii) pencemaran laut dan perairan samudera akibat kegiatan industri lepas pantai dan pesisir misalnya tumpahan minyak dan fasilitas industri ekstraksi di pesisir, (iii) proyek pertambangan dan energi di pesisir pesisir pantai, dan (iv) peningkatan metabolisme sosial dan limbah di lautan yang diproduksi dari aktivitas budidaya laut intensif.
2. Dimensi “**spasial**” yang disebabkan perebutan ruang laut (kontrol) lewat proyek investasi yang keputusannya bersifat **top-down dan tanpa mekanisme partisipasi egaliter**. Dampaknya, ruang penangkapan ikan dan hidup nelayan makin terbatas sehingga menimbulkan perpindahan wilayah tangkapan, dislokasi, dan perampasan ruang hidup komunitas nelayan.
3. Dimensi “**otonomi untuk menentukan nasib sendiri, dan kedaulatan**”. Penyebab timbulnya ketidakadilan ini disebabkan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak nelayan sebagai aktor utama dalam penyediaan pangan protein laut serta kemampuan mereka mengatur dan memutuskan jenis mata pencahariannya sendiri serta mempertahankan identitasnya. Dimensi ini berkaitan dengan gerakan “**kedaulatan pangan**” (Levkoe, Lowitt, & Nelson 2017).

ANTI TESIS EKONOMI BIRU

ANTI TESIS EKONOMI BIRU DI TINGKAT GLOBAL

- 1. Paradigma Degrowth** biru yang menganggap ekonomi biru berorientasi pertumbuhan biru (*blue growth*) sebagai “ilusi” (Ertör & Hadjimichael (2020). Paradigma ini merupakan anti tesis kegagalan pertumbuhan (*growth*) untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan sekaligus keberlanjutan sumberdaya alam dan ekologi. Prosesnya kolektif-deliberatif yang mengendalikan **mekanisme pasar serta menjamin pertukaran barang dan jasa secara adil dalam kehidupan manusia** (Schneider et al, 2013). Dus, memprioritaskan jaminan kualitas hidup manusia ketimbang kuantitas, kooperatif ketimbang kompetisi (Latouche, 2003). Secara ekologi-ekonomi bakal menjamin keberlanjutan sosial dan mengatasi ketidakadilan ekonomi (Kallis, 2010). Pendek kata, paradigma “degrowth” menjamin kesehatan lingkungan dan tak mereproduksi ketidakadilan sosial dalam bidang kelautan secara menyeluruh
- 2. Keadilan biru (*blue justice*)** sebagai anti tesis ekonomi biru. Yaitu suatu “**governability**” melalui mekanisme pengembangan kelembagaan (***right institutions***) bersifat transdisipliner (terintegrasi), partisipatif, dan holistik (Jentoft, 2022).

Fakta-fakta “Kegagalan Dan Dampak” Dari Praktik Ekonomi Biru Dari Berbagai Negara Di Dunia

No	Aktor Negara/Le mbaga	Kebijakan	Dampak	Sumber
1.	Seychelles	▪ Memosisikan laut sebagai ruang pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi lewat eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ▪ Pengelolaan perikanan tuna Seychelles justru lebih berorientasi industrialisasi ▪ Intervensi Bank Dunia lewat marine debt-for-nature swaps sebagai instrumen mengurangi utangnya	Industri perikanan tunanya dikuasai armada Uni Eropa serta perikanan skala kecil hingga masyarakat adat terpinggirkan	(Schutter et al 2021)
2.	Afrika Selatan	“Operasi Phakisa” tahun 2014 dirancang McKinsey. Proyeknya, investasi pelayaran dan infrastruktur pelabuhan, ekstraksi minyak dan gas lepas pantai, dan penambangan dasar laut	• Masifnya perubahan iklim: peningkatan suhu pantai secara ekstrem, pemanasan dan pengasaman air laut (ancaman pemutihan terumbu karang), kenaikan permukaan lautan, kekeringan kota wisata Cape Town • Sampah plastik menumpuk dalam badan air dan pesisir pantai yang mengancam kehidupan biota laut, dan • Perampasan lahan komunitas desa pesisir Wild Coast Xolobeni, buat area penambangan Titanium.	(Bond, 2019)
3.	Berbagai Negara	Dalam paradigma ekonomi biru memosisikan laut sebagai: a) Modal alamiah (Oceans as Natural Capital) b) Sumber mata pencaharian (Oceans as Livelihoods) c) Ladang bisnis yang baik (Oceans as Good Business) d) Pendorong inovasi (Oceans as a Driver of Innovation)	Meningkatnya tekanan lautan, dan perubahan iklim hingga ancaman antropogenik akibat penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat, dan polusi	(Voyer et al., 2018).

Fakta-fakta “Kegagalan Dan Dampak” Dari Praktik Ekonomi Biru Dari Berbagai Negara Di Dunia

4.	Zanzibar, Tanzania, Chili, Prancis dan Inggris (UK).	Kebijakan Ekonomi Biru dalam Tatakelola Kelautan	Timbulnya: diskriminasi gender yang meminggirkan partisipasi perempuan dalam tata kelola perikanan melalui ketidakadilan prosedural pada perikanan skala kecil	(Gustavsson, 2021)
5.	Berbagai Negara	Kebijakan dalam pembangunan dan tata kelola kelautan yang mendorong penciptaan pertumbuhan biru (blue growth) melalui eksploitasi ruang laut	• Perampasan laut, • Degradasi lingkungan, • Marginalisasi perempuan, • Pelanggaran hak asasi manusia dan masyarakat adat, • Timbulnya dampak sosial dan budaya serta • Berkurangnya ketahanan pangan dan merosotnya kesejahteraan nelayan	(Bennett et al., 2015) (Bennett et al., 2021) (Gustavsson et al 2021)
6.	Berbagai lembaga internasional/regional (Komisi Eropa, Komisi Uni Afrika, FAO)	Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Biru. Fokus: Budidaya laut, pariwisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi kelautan, dan pertambangan laut dalam (deep sea).	• Peningkatan eksploitasi, ekstraksi, produksi, dan konsumsi kapitalis yang disebabkan kebijakan kelautan neoliberal. • ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang laut/biru: (i) pengusuran masyarakat pesisir dan nelayan (ii) perampasan sumber daya perairan dan privatisasi laut dan garis pantai, (iii) membatasi/mencegah pemanfaatan umum wilayah laut	(Mills 2018; Pictou 2018), (Barbesgaard 2018), Clausen & Clark 2005), Ertör & Hadjimichael (2020)

Fakta-fakta “Kegagalan Dan Dampak” Dari Praktik Ekonomi Biru Dari Berbagai Negara Di Dunia

7.	Palau, Pohnpei, dan Yap	Kebijakan ekspor Teripang untuk pasar global	• Tragedi komoditas yang menyebabkan tingkat deplesi stok teripang, masyarakat pesisir kehilangan hak kelola, kesenjangan dan kemiskinan meningkat serta krisis ekologi, dan perubahan iklim kian masif	(Ferguson et al 2022)
8.	Papua Nugini	Pertambangan Laut Dalam. yaitu emas dan tembaga berlangsung di perairan laut sedalam 1600 m (deep sea) di pulau Duke of York Islands	• Menggerus makna geo-spiritual masyarakat pulaunya; • Mengganggu keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pulau, • Degradasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi pulau kecil	(Szerszynski 2017) (Childs, 2019)
9.	Namibia	Kebijakan eksploitasi pertambangan di perairan ZEE Namibia dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya mineral laut berupa fosfat	• Konsep ekonomi biru yang hanya menjadi justifikasi proyek-proyek pertambangan laut dalam. • Degradasi lingkungan dan dampak sosial yang negatif, utamanya terhadap mata pencaharian dalam sektor perikanan Namibia. • Masalah perburuhan, dan konflik kepemilikan	(Carver 2019)

Fakta-fakta “Kegagalan Dan Dampak” Dari Praktik Ekonomi Biru Dari Berbagai Negara Di Dunia

10.	Kiribati	Kebijakan pertambangan laut dalam dan Kawasan Konservasi Laut atas nama keberlanjutan dengan pembagian konsensi di perairan ZEE Kiribati	• Terjadi perampasan dasar laut • Perikanan skala kecil bukan bagian agenda ekonomi biru •	(Brent et al 2020),
11.	Turkey	• Kebijakan transisi dari perikanan tangkap menjadi budidaya • Peningkatan produksi perikanan budidaya dari 1.500 ton pertambak (1990) menjadi 1 juta ton (2019) dengan model tambak berbentuk melingkat dengan diameter 50 m	Ketergantungan pada ikan teri di laut Hitam untuk bahan baku pakan yang menyebabkan penangkapan berlebihan dan tekanan ekologi	(Brent et al 2020),
12.	Negara – Negara Pasifik	• Kebijakan benefit sharing melalui ekonomi biru sejak tahun 2011 bagi negara berbasis pulau kecil di Pasifik	• Kegagalan menciptakan keadilan dalam pembagian manfaat sumber daya kelautan (equitable benefit sharing of ocean resources) • Kegagalan mendukung pemulihan dan kebutuhan pembangunan (small island developing states/SIDS) secara adil. Penyebabnya, tak hanya mengganggu pemulihan ekonomi secara adil, inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga melemahkan dan mematikan nilai dari agenda SIDS	(Louey 2022)

Rekomendasi bagi Keberlanjutan dan Kesenjangan Sosial dalam: Paradigma, Kebijakan, Praktik, dan Model Pembangunan Ekonomi Biru (Bennet et al 2022)

1. **Memikirkan ulang dan mengubah paradigma dan narasi pembangunan ekonomi biru.**
 - Memosisikan rakyat sebagai yang terdepan mendapatkan keuntungan dari dari paradigma pembangunan ekonomi biru.
 - Memosisikan keberlanjutan sosial, kesetaraan, masyarakat pesisir, mata pencaharian, dan kesejahteraan manusia sebagai pusat narasi ekonomi biru.
 - Memanfaatkan metrik holistik (misalnya, kesejahteraan manusia, keberlanjutan sosial, mata pencaharian, kualitas hidup) untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari ekonomi biru terhadap masyarakat.
 - Mengadopsi paradigma ekonomi alternatif (misalnya *degrowth economics*, *post-growth economics*, *human-centered economics*, *doughnut economics*, *steady state economics*, and *prosperity without growth*) untuk memandu pengembangan ekonomi biru
2. **Mengarusutamakan *keberlanjutan dan kesetaraan sosial* dalam pembahasan dan dokumen kebijakan internasional maupun nasional.**
 - Mendiskusikan tentang keberlanjutan dan kesetaraan sosial dalam forum yang membahas kebijakan kelautan global maupun proses kebijakan nasional dalam suatu negara.
 - Termasuk, pendanaan dan representasi dari masyarakat pesisir dan kelompok marjinal dalam pertemuan dan proses penyusunan kebijakan kelautan.
 - Memberikan perhatian seirius terhadap keberlanjutan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan manusia dalam dokumen kebijakan ekonomi biru secara global.
 - Mengedepankan tujuan sosial dalam strategi kebijakan nasional dan mengidentifikasi tindakan yang jelas dan spesifik untuk melindungi hak asasi manusia, meningkatkan manfaat yang nyata, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir

Rekomendasi bagi Keberlanjutan dan Kesenjangan Sosial dalam: Paradigma, Kebijakan, Praktik, dan Model Pembangunan Ekonomi Biru (Bennet et al 2022)

3. **Mendorong prinsip dan praktik pada sektor swasta dari melindungi haknya menjadi meningkatkan kesejahteraan umat manusia.**
 - Menggeser mentalitas sektor swasta dari "*do less harm*" (mengurangi kerugian), atau "*do not harm*" (tidak merugikan), menjadi "*do more good*" (*banyak berbuat kebaikan*) terhadap masyarakat pesisir dan penduduk dalam aktivitas ekonomi biru.
 - Secara efektif terlibat dalam menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
 - Mengadopsi pendekatan alternatif dalam pembangunan ekonomi biru, serta model kepemilikan, struktur perusahaan, dan mekanisme bagi hasil yang lebih adil.
 - Merumuskan prinsip investasi ***Environmental, Social, and Governance*** (ESG) dalam ekonomi biru berdasarkan hak-hak dasar dan aspirasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4. **Mengidentifikasi dan memperluas model dan peluang pengembangan ekonomi biru berbasis masyarakat lokal.**
 - Mengidentifikasi inisiatif dan dukungan ekonomi biru berbasis masyarakat
 - Menentukan potensi dan inisiasi ekonomi biru yang dapat dikembangkan secara lokal.
 - Mengartikulasikan visi ekonomi biru secara lokal bagi masyarakat pesisir.
 - Mengidentifikasi potensi dukungan dari badan-badan pembangunan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.
 - Adanya inisiasi dan inovasi pendanaan bagi ekonomi biru yang berkeadilan

Model Pendekatan Khas Indonesia

- Di tengah hegemoni “ekonomi biru” mestinya pemerintah melongok kembali pendekatan historis-struktural dalam ekonomi politik pembangunan Indonesia. **Furnival** telah mengingatkan bahwa sejarah pendekatan pembangunan ekonomi pra dan pasca kemerdekaan Indonesia bersifat **plural/majemuk**.
- Dalam terminology ekonomi politik dan pembangunan disebut sebagai pendekatan heterodoks/eklektik (menyempal dari kapitalisme dan strutulralisme/sosialisme)
- Pendekatan ini menawarkan pertautan antara kelembagaan, struktur sosial, sejarah dan kelembagaan (**intitution-history-social structure**). Anti tesis pandangan neo-klasik yang menganut prinsip keseimbangan, individualisme dan rasionalitas (**rationality-individualism-equilibrium**) (Lavoie, 2006).
- Tawaran pendekatan pembangunan dalam tatakelola kelautan dalam pendekatan heterodoks/eklektik:
 - **“Perkawinan silang”** (hybrid) antara model-model pendekatan kultural/lokalitas berbasis adat, budaya dan agama dengan modern berbasis inovasi, dan efisiensi. Dikenal sebagai hybrid/heterodoks/eklektik. Yaitu, model-model tatakelola berbasis adat, maupun pengetahuan lokal dalam sumberdaya kelautan dan perikanan yang secara filosofi serta praksisnya dikawinkan dengan prinsip efisiensi serta inovasi berbasis teknologi kekinian untuk melahirkan tatakelola kelautan **hibrid** ala Indonesia .
 - **“Melahirkan Model Sendiri”** yaitu pendekatan yang tidak bias pendekatan modern (barat) dan juga tidak seluruhnya bias pendekatan lokalitas berbasis adat, budaya maupun agama. Dengan kata lain menegaskan lokasitas (Indonesia) atau menegaskan pendekatan barat. Masalahnya kedua pendekatan itu seringkali **vis a vis dan terpolarisasi** dalam **ide, konsepsi secara intelektual dan praksisnya sebagai model pembangunan negara dunia ketiga maupun terbelakang**. Untuk mewujudkannya diperlukan riset mendalam untuk melahirkan suatu model pembangunan dan tata kelola kelautan yang **“genuine”** Indonesia dan “keluar” dari polarisasi tersebut di atas.

Institusionalisasi *ala* Buen Vivier

- *Buen Vivier* aktivitas ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan alam, mengurangi ketidakadilan sosial berdasarkan solidaritas dan kemajemukan berdemokrasi, dan memberi ruang partisipasi sosial bagi masyarakat sipil di masyarakat local/adat di Ekuador dan Bolivia
- Negara mestinya memasukan tatakelola berbasis lokalitas/adat ini sebagai bagian dari konstitusi (institusionalisasi) yang mengabadikan dan mengakui hak hidup serta alam yang juga memiliki “subyek hak”.
- Dengan proses institusional ini berperan sebagai prinsip-prinsip dalam pedoman kehidupan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat pesisir yang selama ini kerap jadi “korban” pembangunan.
- Dengan cara ini, hak asasi manusia diperlengkapi dengan hak-hak alamiah demikian pula sebaliknya. Dengan demikian secara permanen tercipta demokrasi partisipatif berbasiskan kewarganegaraan.
- Praktik di Ekuador tahun 2007, Presiden menjalankan **ketentan Yasuní-Inisiatif yaitu konstitusi** yang bersumber dari Buen Vivier. Perusahaan minyak Texaco (Chevron) dan British Petroleum (BP) diperintahkan pengadilan Ekuador membayar kompensasi akibat **kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas produksi minyak di wilayah Amazon** tahun 2011 dan 2010.

REFERENSI

- Ayilu, RK., Fabinyi M., & Barclay K, 2022. Small-Scale Fisheries in the Blue Economy: Review of Scholarly Papers and Multilateral Documents. Ocean and Coastal Management 216. 105982. Elsevier. journal homepage: www.elsevier.com/locate/ocecoaman
- AU-IBAR, 2019. African Blue Economy Strategy. Nairobi, Kenya. https://www.au-ibar.org/sites/default/files/2020-10/sd_20200313_africa_blue_economy_strategy_en.pdf.
- Bennett, N.J., Blythe, J., White, C.S., Campero, C., 2021. Blue Growth and Blue Justice: Ten Risks and Solutions for the Ocean Economy. Mar. Pol. 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>.
- Bennett, N.J., Cisneros-Montemayor, A.M., Blythe, J., Silver, J.J., Singh, G., Andrews, N., Sumaila, U.R., 2019. Towards a Sustainable and Equitable Blue Economy. Nat. Sustain. 2 (11), 991–993. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1>.
- Bennet, NJ. 2022. Mainstreaming Equity and Justice in the Ocean Vol 9. Article 873572 Frontiers in Marine Science | www.frontiersin.org
- Bennett, N.J., Govan, H., Satterfield, T., 2015. Ocean Grabbing. Mar. Pol. 57, 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>.
- Brent, Z.W., Barbesgaard, M., Pedersen, C., 2020. The Blue Fix: What's Driving Blue Growth? Sustain. Sci. 15 (1), 31–43. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00777-7>.
- Boyer R and Toshio Y. 2000 (Editors), Japanese Capitalism in Crisis. A Regulation Interpretation. Routledge. Taylor & Francia Group, London and New York, Pg 202-207
- Carver R. 2019. Lessons for blue degrowth from Namibia's emerging blue economy Sustainability Science, 15:131–143 <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00754-0>
- Carmine G, Mayorga J, Miller NA, Park J., Halpin PN, Crespo GO, Osterblom H, Sala E, and Jacquet J. 2020. Who is the High Seas Fishing Industry? One Earth 3, 730–738.

REFERENSI

- Das 2023. Blue Economy, Blue Growth, Social Equity, and Small Scale Fisheries: A Global and National Level Review. Studies in Social Science Research. ISSN 2690-0793 (Print) ISSN 2690-0785 (Online). Vol. 4, No. 1, 2023, www.scholink.org/ojs/index.php/sssr
- Damanhuri, 2022. Model Negara Kesejahteraan Indonesia: Pendekatan Heterodoks. Editor: Muhamad Karim dan Auhadillah Azizy. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Farmery, AK, Allison, EH, Andrew, NL., Troell, M., Voyer, M., Campbell, B., Eriksson, H., Fabinyi, M., Song, AM., and Steenbergen D. 2021. Blind spots in Visions of a “Blue Economy” could Undermine the Ocean’s Contribution to Eliminating Hunger and Malnutrition. One Earth 4,
- Gerber, JF and Rolf S. 2012. Towards an Integrated Paradigm in Heterodox Economics Alternative Approaches to the Current Eco-Social Crises. London: Palgrave Macmillan
- Karim, M. 2022. Renaisans Negara Maritim Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Plantaxia.
- Karim, M. 2022. Oligarki Perikanan Indonesia. Opini Kompas 27 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/24/oligarki-perikanan-indonesia>
- Karim, M. 2022. Menuju Keadilan Kelautan. Opini, Koran Investor Daily 10 Agustus 2022.
- Karim, M. 2022. Paradoks Ekonomi Biru. Opini. Bisnis Indonesia. 10 Oktober 2022.
- Karim, M. 2022. Kritik Atas Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan. Opini Koran Tempo 21 September 2022.
- Louey P (2022) The Blue Economy’s Retreat from Equity: A Decade Under Global Negotiation. Front. Polit. Sci. 4:999571. doi: 10.3389/fpos.2022.999571
- Martínez-Vázquez RM, Milán-García J and Valenciano JDP. 2021. Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends. Environ Sci Eur, 33:61, <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- Morgan, PJ., Huang, MC., Voyer, M., Benzaken, D., & Watanabe, A. 2022. Blue Economy and Blue Finance: Toward Sustainable Development and Ocean Governance. Billions of people in Asia and the Pacific Depend on Healthy Oceans for Their Livelihoods, Food Security, Health, and Recreation. Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.56506/HDLZ1912>.

REFERENSI

- Österblom H, Jouffray¹ JB, Folke C, Crona B, Troell M, Merrie A, Rockström J. 2015. Transnational Corporations as 'Keystone Actors' in Marine Ecosystems. PLoS ONE 10 (5): e0127533. doi:10.1371/journal.pone.0127533
- Sala E, Mayorga J, Costello C, Kroodsma D, Palomares MLD, Pauly D, U. Sumaila S, Zeller D. 2018. The Economics of Fishing the High Seas. Science Advances, 4: (6), eaat2504. • DOI: 10.1126/sciadv.aat2504.
- Schutter MS., Christina C. Hicks CC., Phelps J., & Waterton C. 2021. The Blue Economy as a Boundary Object for Hegemony Across Scales. Marine Policy 132, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104673>. Published by Elsevier Ltd.
- Schreiber MA, Chuenpagdee R, Jentoft S. 2022. Blue Justice and the Co-production of Hermeneutical Resources for Small-Scale Fisheries Marine Policy 137. 104959. Published by Elsevier Ltd.
- Silver, JJ., Gray NJ, Campbell, LM., Fairbanks, LW., & Gruby RL., 2015. Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance. J. Environ. Dev. 24, 135–160.
- Sumaila UR, Walsh M, Hoareau K, Cox A., Teh L, Abdallah P, Akpalu W, Anna Z, Benzaken D, Crona B, Fitzgerald T, Heaps L, Issifu I, Karousakis K, Lange GM, Leland A, Miller D., Sack K, Shahnaz D., Thiele T., Vestergaard N., Yagi N., & Zhang J., 2021. Financing a Sustainable Ocean Economy. Nature Communications volume 12, Article number: 3259.
- Virdin, J, Vegh¹ T, Jouffray JB, Blasiak R, Mason S, Österblom H, Vermeer D, Wachtmeister H, Werner N. 2021. The Ocean 100: Transnational Corporations in The Ocean Economy. Science Advances. Research Article 7 : eabc8041
- Voyer, M., Quirk G, McIlgorm A., & Azmi K. 2018. Shades of Blue: What do Competing Interpretations of the Blue Economy mean for Oceans Governance? Journal of Environmental Policy & Planning, DOI: 10.1080/1523908X.2018.1473153